

SOSIOLOGI **POLITIK** KONTEMPORER:

DINAMIKA KEKUASAAN, STRUKTUR SOSIAL,
DAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA

Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M.; Dr.Rakhmat, S.E, M.S.E



Pusat Karir dan Riset
STIE Mulia Pratama

2026

**SOSIOLOGI POLITIK KONTEMPORER:
DINAMIKA KEKUASAAN, STRUKTUR SOSIAL, DAN TRANSFORMASI DIGITAL
DI INDONESIA**

Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M.

Dr.Rakhmat, S.E, M.S.E

Pusat Karir dan Riset

STIE Mulia Pratama

2026

**SOSIOLOGI POLITIK KONTEMPORER:
DINAMIKA KEKUASAAN, STRUKTUR SOSIAL, DAN TRANSFORMASI
DIGITAL DI INDONESIA**

Penulis :

Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M.

Dr.Rakhmat, S.E, M.S.E

ISBN :

Editor :

Satrio Surya Gading

Penyunting :

Andi Muhammad Sadli

Desain Sampul dan Tata Letak :

Yohanes Sugiyanta

Penerbit :

Pusat Karir dan Riset

STIE Mulia Pratama

Redaksi :

Gedung STIE Mulia Pratama

Lantai 1, Jl. H.M. Joyomartono Kav. 5 Kota Bekasi

Bekasi Timur 17113

Telp. 021 88353599, 88354599

Fax 021 88359799

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga monograf *Sosiologi Politik Kontemporer: Dinamika Kekuasaan, Struktur Sosial, dan Transformasi Digital di Indonesia* ini dapat terselesaikan dengan baik.

Monograf ini merupakan hasil kajian mendalam penulis mengenai keterkaitan antara sosiologi dan ilmu politik dalam konteks Indonesia kontemporer. Berbeda dengan buku ajar yang bersifat pedagogis, monograf ini hadir sebagai karya ilmiah yang mendalam, terfokus, dan orisinal—mengupas secara sistematis bagaimana struktur sosial, kekuasaan, dan transformasi digital saling membentuk dalam dinamika politik Indonesia pasca-Reformasi.

Sejak Reformasi 1998, demokrasi Indonesia telah berusia lebih dari seperempat abad. Namun, pertanyaan fundamental terus mengemuka: Apakah demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur elektoral yang dikuasai oligarki? Bagaimana struktur sosial—kelas, etnisitas, agama—membentuk peta kekuasaan? Bagaimana revolusi digital mengubah wajah politik Indonesia? Monograf ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis interdisipliner yang memadukan perspektif sosiologis dan politis.

Karya ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek: **teoretis**, melalui sintesis teori sosiologi klasik dan kontemporer dengan teori ilmu politik dalam konteks Indonesia; **empiris**, melalui analisis mendalam atas data dan studi kasus terkini (2020–2025) tentang konflik agraria, politik identitas, demokrasi digital, dan pemberantasan korupsi; serta **metodologis**, melalui penawaran kerangka analisis interdisipliner untuk penelitian lanjutan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua dan jajaran struktural STIE Mulia Pratama atas dukungan dan fasilitas penelitian;
2. Para kolega di STIE Mulia Pratama atas diskusi, kritik, dan masukan yang membangun;

3. Tim Pusat Karir dan Riset STIE Mulia Pratama atas profesionalisme dalam penerbitan;
4. Keluarga tercinta atas doa, kesabaran, dan dukungan moral yang tak terhingga.

Monograf ini ditulis dengan kesadaran bahwa setiap analisis sosial-politik bersifat perspektif dan terbuka untuk kritik. Penulis menerima saran dan masukan dari pembaca demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap monograf ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi politik di Indonesia.

Bekasi, Maret 2026

Penulis,

Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M.

Dr. Rakhmat, S.E., M.S.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF MONOGRAF	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang: Indonesia dalam Pusaran Perubahan	1
1.2. Sosiologi Politik: Definisi, Ruang Lingkup, dan Perkembangan.....	3
1.2.1. Definisi dan Ruang Lingkup	3
1.2.2. Sejarah Perkembangan Sosiologi Politik	4
1.3. Kerangka Analisis: Struktur, Agen, dan Transformasi	6
1.3.1. Dualitas Struktur dan Agensi (Giddens)	7
1.3.2. Tiga Dimensi Kekuasaan (Lukes)	7
1.3.3. Habitus, Modal, dan Ranah (Bourdieu)	8
1.3.4. Sintesis Kerangka Analisis Monograf.....	9
1.3.5. Ketegangan Teoretis dan Posisi Penelitian	11
1.4. Metodologi dan Sumber Data	13
1.4.1. Pendekatan Penelitian	13
1.4.2. Sumber Data	17
1.4.3. Teknik Analisis Data	19
1.4.4. Validitas dan Reliabilitas	21

1.4.5. Keterbatasan Penelitian	23
1.4.6. Strategi Pemilihan Data (Data Selection Justification)	23
1.4.7. Prosedur Analisis dan Skema Pengkodean (Coding Scheme)	24
1.5. Sistematika Penulisan.....	26
1.6. Posisi Indonesia dalam Lanskap Global Sosiologi Politik Kontemporer ..	28
1.6.1. Demokrasi di Global South: Antara Konsolidasi dan Distorsi Oligarkis...	28
1.6.2. Transformasi Digital dan Risiko Digital Authoritarianism.....	29
1.6.3. Politik Identitas dalam Perspektif Global: Polarisasi sebagai Fenomena Transnasional	30
1.6.4. Kontribusi Teoretis Indonesia dalam Literatur Global	30
BAB 2: STRUKTUR SOSIAL DAN KEKUASAAN.....	33
2.1. Pendahuluan: Relasi Struktur dan Kekuasaan.....	33
2.2. Warisan Kolonial: Stratifikasi dan Politik Identitas.....	34
2.2.1. Struktur Sosial Masa Kolonial	34
2.2.2. Politik Etis dan Lahirnya Kelas Terdidik	36
2.2.3. Warisan Kolonial dalam Struktur Sosial Kontemporer.....	37
2.3. Orde Baru: Negara Kuat, Masyarakat Lemah	38
2.3.1. Politik Pembangunan dan Sentralisasi Kekuasaan	38
2.3.2. Kelas Menengah Baru dan Reproduksi Oligarki.....	40
2.3.3. Penindasan Masyarakat Sipil	40
2.4. Reformasi: Kebangkitan Masyarakat Sipil dan Oligarki Baru.....	41
2.4.1. Transisi Demokrasi 1998	41
2.4.2. Ledakan Civil Society dan Partisipasi Politik	42
2.4.3. Oligarki Baru: Demokrasi Tanpa Keadilan.....	43

2.5. Struktur Kelas Indonesia Kontemporer: Antara Pertumbuhan Kelas Menengah dan Ketimpangan.....	44
2.5.1. Profil Kelas Menengah Indonesia	44
2.5.2. Kemiskinan dan Ketimpangan	50
2.6. Refleksi Teoretis: Bourdieu, Weber, dan Relevansinya	52
2.6.1. Bourdieu: Modal, Habitus, dan Reproduksi	52
2.6.2. Weber: Kelas, Status, dan Partai	53
2.6.3. Relevansi bagi Analisis Indonesia.....	53
2.7. Ringkasan	54
BAB 3: DEMOKRASI DAN OLIGARK PARADOKS POLITIK INDONESIA	58
3.1. Pendahuluan: Demokrasi Elektoral vs Demokrasi Substantif.....	58
3.2. Oligarki Politik: Konsep, Debat, dan Bukti Empiris.....	63
3.2.1. Definisi Oligarki dan Debat Teoretis	63
3.2.2. Oligarki dalam Demokrasi: Perspektif Jeffrey Winters	67
3.2.3. Bukti Empiris Oligarki di Indonesia	68
3.3. Partai Politik sebagai Kendaraan Oligarki	70
3.3.1. Karakteristik Partai Politik Indonesia	70
3.3.2. Personalisasi dan Dinasti Politik	74
3.3.3. Pendanaan Partai dan Politik Uang	75
3.4. Case Selection Logic	79
3.5. Analytical Strategy	79
3.6. Pemilu dan Politik Uang: Mekanisme Reproduksi Kekuasaan.....	80
3.6.1. Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka.....	80
3.6.2. Praktik Politik Uang dalam Pemilu	81
3.6.3. Dampak Politik Uang terhadap Representasi	86

3.7.	Civil Society: Antara Pengawasan dan Kooptasi	89
3.7.1.	Peran Civil Society dalam Pengawasan Demokrasi.....	89
3.7.2.	Kooptasi dan Fragmentasi Civil Society	94
3.7.3.	Studi Kasus: ICW, Kontras, dan Perludem	95
3.8.	Refleksi: Apakah Demokrasi Indonesia Hanya Prosedural?.....	96
3.9.	Ringkasan	98
BAB 4: POLITIK IDENTITAS KEBANGKITAN DAN IMPLIKASINYA		102
4.1.	Pendahuluan: Dari Politik Ideologi ke Politik Identitas	102
4.2.	Akar Historis Politik Identitas di Indonesia	104
4.2.1.	Kolonialisme dan Politik Pecah Belah	104
4.2.2.	Orde Baru: Represi dan Politik Identitas Bawah Tanah	105
4.2.3.	Reformasi: Kebangkitan Politik Identitas	106
4.3.	Pilkada DKI 2017: Titik Balik Politik Identitas	108
4.3.1.	Dinamika Kampanye dan Mobilisasi Identitas	108
4.3.2.	Isu Penodaan Agama dan Polarisasi.....	113
4.3.3.	Dampak Jangka Panjang Pilkada DKI 2017	114
4.4.	Polarisasi dan Fragmentasi Ruang Publik	117
4.4.1.	Polarisasi di Media Sosial	117
4.4.2.	Fragmentasi Ruang Publik dan Echo Chambers	118
4.4.3.	Dampak Polarisasi terhadap Kohesi Sosial	120
4.5.	Dampak Politik Identitas: Kohesi Sosial dan Kebijakan	126
4.5.1.	Dampak pada Kohesi Sosial.....	126
4.5.2.	Dampak pada Kebijakan Publik	127
4.5.3.	Dampak pada Hak Minoritas.....	128
4.6.	Refleksi: Mengatasi Polarisasi tanpa Menghilangkan Keragaman	130

4.7.	Ringkasan	131
BAB 5: TRANSFORMASI DIGITAL DAN DEMOKRASI ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN		
135		
5.1.	Pendahuluan: Revolusi Digital dan Politik	135
5.2.	Ruang Publik Digital: Karakteristik dan Dinamika	137
5.2.1.	Definisi dan Karakteristik Ruang Publik Digital	137
5.2.2.	Infrastruktur Digital di Indonesia	140
5.3.	Kampanye Digital: Micro-Targeting dan Politisi Influencer	142
5.3.1.	Evolusi Kampanye Politik di Era Digital	142
5.3.2.	Micro-Targeting dan Penggunaan Data Pribadi	144
5.3.3.	Politisi Influencer dan Politik Populis.....	146
5.4.	Disinformasi dan Polarisasi Algoritmik	148
5.4.1.	Fenomena Disinformasi di Indonesia.....	148
5.4.2.	Algoritma dan Polarisasi	151
5.4.3.	Dampak Disinformasi terhadap Demokrasi	152
5.5.	Aktivisme Digital: Gerakan #ReformasiDikorupsi dan #GejayanMemanggil 154	
5.5.1.	Kronologi Gerakan #ReformasiDikorupsi	154
5.5.2.	Kekuatan dan Keterbatasan Aktivisme Digital	155
5.5.3.	Perbandingan dengan Gerakan Konvensional.....	156
5.6.	Pengawasan Digital: Negara, Korporasi, dan Privasi	159
5.6.1.	Kapasitas Pengawasan Negara	159
5.6.2.	Pengawasan oleh Platform Digital	160
5.6.3.	Tantangan Perlindungan Data Pribadi.....	161
5.7.	Refleksi: Demokrasi Digital yang Mana?	163

5.8. Ringkasan	165
BAB 6: KONFLIK AGRARIA DAN KETIMPANGAN SOSIAL STRUKTUR KEKUASAAN DI BALIK SUMBER DAYA ALAM.....	
6.1. Pendahuluan: Agraria sebagai Isu Struktural	170
6.2. Perkembangan Konflik Agraria di Indonesia Pasca-Reformasi.....	172
6.2.1. Data dan Dinamika Konflik Agraria	172
6.2.2. Sektor Penyebab Konflik	173
6.2.3. Pola Konflik dan Korban.....	174
6.3. Studi Kasus: Rempang, Kendeng, dan Wadas	176
6.3.1. Kasus Rempang: Sengketa Pulau di Batam	176
6.3.2. Kasus Kendeng: Penolakan Pabrik Semen.....	177
6.3.3. Kasus Wadas: Pengadaan Tanah untuk Bendungan	179
6.3.4. Analisis Komparatif Tiga Kasus	180
6.4. Negara, Modal, dan Masyarakat: Pola Hubungan Konflikual	183
6.4.1. Negara sebagai Fasilitator Modal.....	183
6.4.2. Kriminalisasi Aktivis dan Pembungkaman	185
6.4.3. Perlawanan Masyarakat dan Solidaritas.....	186
6.5. Reforma Agraria: Antara Retorika dan Realitas	187
6.5.1. Kebijakan Reforma Agraria Pasca-Reformasi	187
6.5.2. Hambatan Implementasi.....	188
6.5.3. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Harapan	192
6.6. Refleksi: Keadilan Agraria untuk Indonesia	194
6.7. Ringkasan	197
BAB 7: KORUPSI DAN GOOD GOVERNANCE PEMBERANTASAN YANG TERHAMBAT.....	
	201

7.1.	Pendahuluan: Korupsi sebagai Masalah Sistemik.....	201
7.2.	Masa Keemasan KPK: 2003–2010	202
7.2.1.	Lahirnya KPK dan Kewenangan Luar Biasa	202
7.2.2.	Keberhasilan Penindakan Koruptor Besar	203
7.2.3.	Kepercayaan Publik yang Tinggi	204
7.3.	Pelemahan Institusi Antikorupsi 2011–2024	205
7.3.1.	Upaya Pelemahan KPK.....	205
7.3.2.	Kriminalisasi Pimpinan KPK.....	206
7.3.3.	Revisi UU KPK 2019 dan Dampaknya.....	207
7.4.	Studi Kasus: E-KTP dan Skema Korupsi Sistemik.....	208
7.4.1.	Latar Belakang Proyek E-KTP.....	208
7.4.2.	Skema Korupsi dan Aktor yang Terlibat.....	209
7.4.3.	Proses Hukum dan Putusan	210
7.5.	Akar Korupsi: Oligarki, Patronase, dan Budaya	212
7.5.1.	Korupsi dan Oligarki.....	212
7.5.2.	Patronase sebagai Mekanisme Korupsi	213
7.5.3.	Budaya Korupsi dan Toleransi Sosial	214
7.6.	Refleksi: Membangun Tata Kelola yang Bersih	215
7.7.	Ringkasan	216
BAB 8: KESIMPULAN SOSIOLOGI POLITIK KONTEMPORER DAN MASA DEPAN INDONESIA.....		219
8.1.	Sintesis: Struktur, Agen, dan Transformasi	219
8.2.	Temuan Utama: Antara Harapan dan Realitas	221
8.3.	Implikasi Teoretis dan Praktis.....	222
8.3.1.	Implikasi bagi Teori Sosiologi Politik	222

8.3.2. Implikasi bagi Kebijakan Publik	223
8.3.3. Implikasi bagi Praktik Demokrasi	224
8.4. Agenda ke Depan: Menuju Indonesia Emas 2045	225
8.4.1. Skenario Masa Depan Demokrasi Indonesia	225
8.4.2. Agenda Reformasi Prioritas	227
8.4.3. Peran Ilmu Sosial dalam Perubahan	228
8.5. Penutup	228
8.6. Implikasi Teoretis terhadap Literatur Global	230
8.6.1. Kontribusi terhadap Literatur Demokrasi Global South	230
8.6.2. Kontribusi terhadap Literatur Digital Politics	231
8.6.3. Kontribusi terhadap Teori Oligarki dalam Demokrasi Kontemporer	231
8.6.4. Sintesis Kontribusi Teoretis	232
DAFTAR PUSTAKA	9
GLOSARIUM	13
INDEKS	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan sosiologi politik.....	4
Tabel 1.2. Tiga Dimensi Kekuasaan (Lukes).....	8
Tabel 1.3. Operasionalisasi Kerangka Analisis Giddens-Lukes-Bourdieu.....	14
Tabel 1.4. Sistematika Penulisan Monograf	26
Tabel 2.1. Stratifikasi Tiga Lapis Masyarakat Kolonial Hindia Belanda	35
Tabel 2. 2. Segmen Kelas Menengah Indonesia	44
Tabel 3.1. Demokrasi Elektoral vs Demokrasi Substantif di Indonesia	58
Tabel 3.2. Tipe Oligarki menurut Jeffrey Winters	63
Tabel 3.3. Karakteristik Partai Politik Indonesia Pasca-Reformasi	71
Tabel 3.5. Sumber Pendanaan Partai Politik di Indonesia	75
Tabel 3.5. Pola Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia	82
Tabel 3.6. Peran Civil Society dalam Pengawasan Demokrasi	89
Tabel 4.1. Kronologi Pilkada DKI Jakarta 2017	108
Tabel 4.2. Dampak Politik Identitas terhadap Kohesi Sosial.....	120
Tabel 5.1, Ruang Publik Konvensional Vs Ruang Publik Digital.	138
Tabel 5.2. Evolusi Kampanye Politik Di Era Digital.....	143
Tabel 5.3. Jenis-Jenis Disinformasi Di Indonesia.....	149
Tabel 5.4. Kronologi gerakan #ReformasiDikorupsi	154
Tabel 5.5. Gerakan Konvensional Vs Gerakan Digital.....	157
Tabel 5.6. Perlindungan data pribadi	161
Tabel 6.1. Konsorsium Pembaruan Agraria	172
Tabel 6.2. Mengidentifikasi Sektor-Sektor Penyebab Konflik Agraria	173
Tabel 6.3. Studi Kasus: Rempang, Kendeng, dan Wadas	176
Tabel 6.4. Penolakan Pabrik Semen.....	178
Tabel 6.5. Pengadaan Tanah untuk Bendungan	179
Tabel 6.6. Analisis Komparatif Tiga Kasus	181
Tabel 6.7. Kriminalisasi Aktivis dan Pembungkaman.....	185

Tabel 6.8. Antara Retorika dan Realitas	187
Tabel 7.1. Masa Keemasan KPK	202
Tabel 7. 2. Keberhasilan Penindakan Koruptor Besar	203
Tabel 7. 3. Kepercayaan Publik yang Tinggi.	204
Tabel 7. 4. Upaya Pelemahan KPK.....	205
Tabel 7. 5. Kriminalisasi pimpinan KPK	206
Tabel 7.6. Revisi UU KPK 2019 dan Dampaknya.	207
Tabel 7.7. Kronologi proyek E-KTP.....	209
Tabel 7.8. Skema Korupsi dan Aktor yang Terlibat	209
Tabel 7.9. Proses hukum kasus E-KTP	210
Tabel 7.10. Bentuk-bentuk patronase.....	213
Tabel 8.1. Menuju Indonesia Emas 2045	225
Tabel 8.2. Agenda Reformasi Prioritas	227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Mekanisme Oligarki dalam Demokrasi Elektoral	62
Gambar 3.2. <i>Pendanaan Partai & Politik Uang</i>	70
Gambar 3.3. <i>Jaringan Patronase (MICRO)</i>	78
Gambar 3.4. <i>Dinasti Politik</i>	88
Gambar 4.1. Akar Historis Politik Identitas	104
Gambar 4.2. <i>Studi Kasus: Pilkada DKI 2017</i>	116
Gambar 4.3. <i>Polarisasi Media Sosial</i>	117
Gambar 4.4. Fragmentasi Ruang Publik	125
Gambar 4.5. <i>Dampak terhadap Kohesi Sosial</i>	129
Gambar 5.1. <i>Karakteristik Ruang Publik Digital</i>	137
Gambar 5.2. <i>Infrastruktur Digital</i>	142
Gambar 5.3. <i>Network Model – Core</i>	148
Gambar 5.4. <i>analisis engagement, populisme, strategi komunikasi</i>	153
Gambar 5.5. <i>Analisis Echo Chamber, Filter Bubble, Fragmentasi</i>	159
Gambar 5.6. <i>Siklus Disinformasi di Media Sosial</i>	163
Gambar 5.7. <i>Kronologi Gerakan #ReformasiDikorupsi</i>	165
Gambar 5.8. <i>Pengawasan Digital: Negara, Korporasi, dan Privasi</i>	167
Gambar 6.1. Tren Konflik Agraria di Indonesia (2015–2023)	171
Gambar 6.2. <i>Distribusi Konflik Agraria Berdasarkan Sektor</i>	175
Gambar 6.3. <i>Pola Konflik Agraria yang Berulang di Indonesia</i>	182
Gambar 6.4. <i>Pola Sebarang Konflik di Indonesia. (2015 – 2025)</i>	184
Gambar 6.5. <i>Alur Konflik Agrariaa : Studi Kasus Rempang dan Wadas</i>	190
Gambar 6.6. <i>. Perempuan Kendeng sebagai Simbol Perlawanan Agraria di Indonesia</i>	191
Gambar 6.7. <i>Diagram Alur Konflik Wadas dan Kriminalisasi</i>	192
Gambar 6.8. <i>Implementasi Putusan MK.</i>	194
Gambar 6.9. <i>Negara sebagai Fasilitator Modal dalaam Konflik Agraria.</i>	196

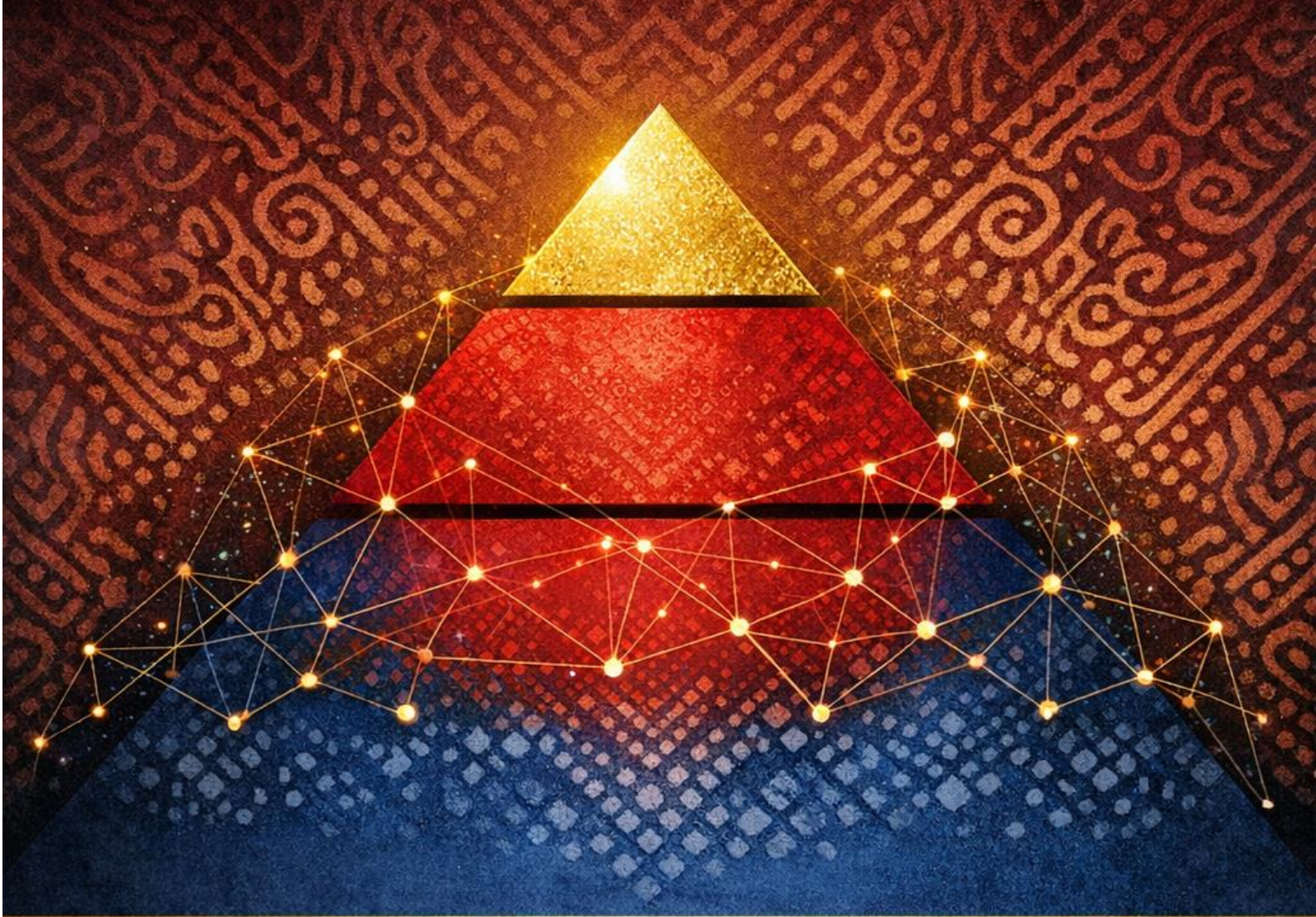
<i>Gambar 6.10. Strategi Perlawanan Masyarakat Agraria dalam Menghadapi Konflik.....</i>	197
---	------------

BAB 1

SOSIOLOGI POLITIK KONTEMPORER

Dinamika Kekuasaan, Struktur Sosial,
dan Transformasi Digital di Indonesia





BAB 2

Struktur Sosial dan Kelas Politik

“Masyaarakat tanpa diferensiasi sosial dan tanpa pelapisan sosial tidak mungkin ada.”

— Selo Soemardjan

Kelas Politik

| Oligarki

| Stratifikasi

| Mobilitas Sosial



BAB 3

Demokrasi dan Oligarki: *Paradoks Politik Indonesia*

“Demokrasi selalu berjalan di atas tali keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan kaum elit.”

Transisi demokrasi di Indonesia telah melahirkan paradoks antara prosedur demokratis dengan penguasa oligarki. Bab ini akan membahas bagaimana kekuasaan elite mempengaruhi proses politik dan dinamika kebijakan di Indonesia.

• Demokrasi Prosedural • Oligarki • Elit Politik • Klientelisme • Kapital Politik •



BAB 4

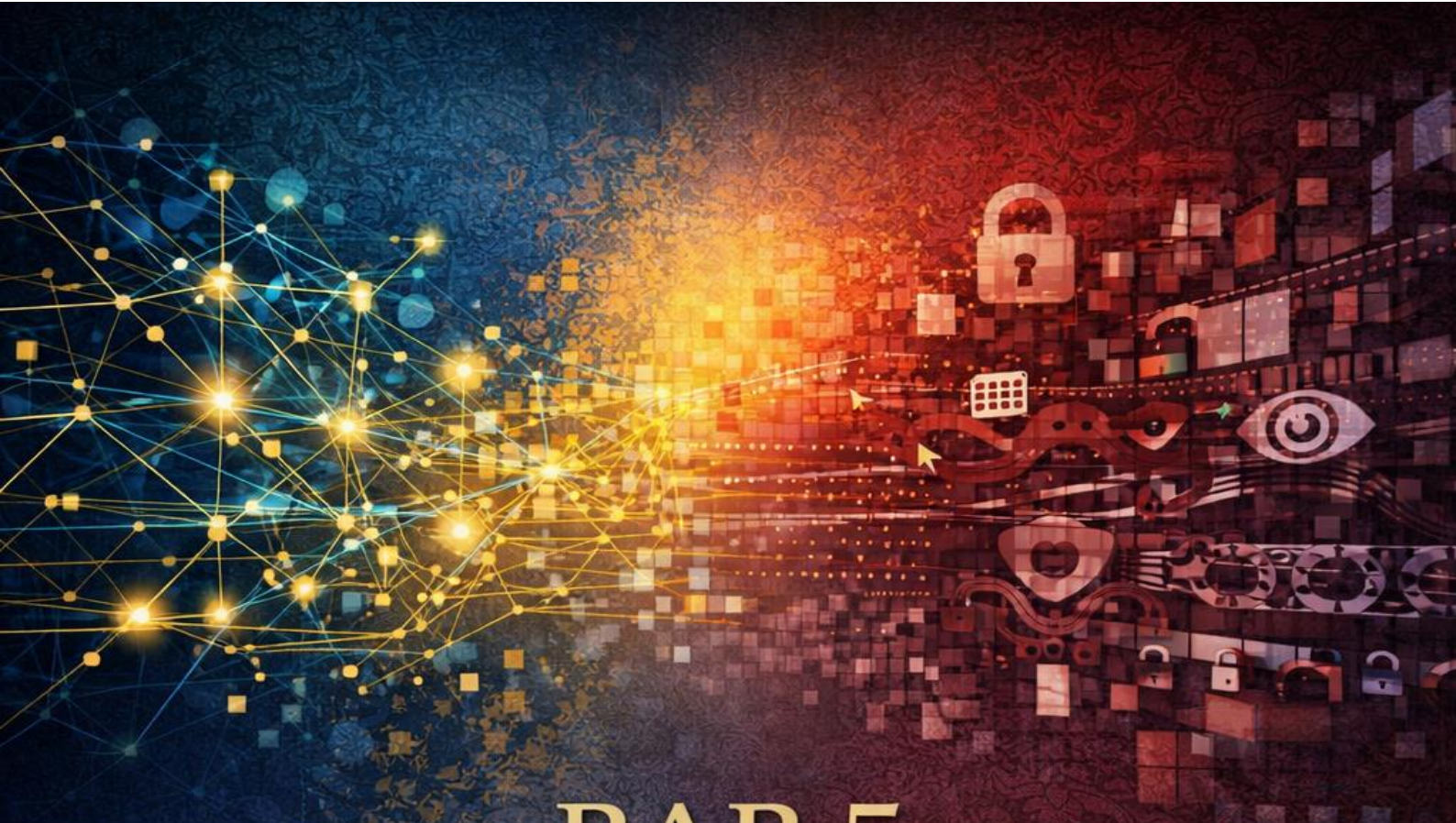
Politik Identitas: *Kebangkitan dan Implikasinya*

*"Politik identitas mengubah perbedaan menjadi alat untuk
mengambil kekuatan."*

— Miriam Budiardjo

Bab ini akan membahas bagaimana *politik identitas* dan *identitas* dan perkembangan di Indonesia serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik.

• Politik Identitas • Etnisitas • Populisme • Radikalisme Digital • Kohesi Sosial •



BAB 5

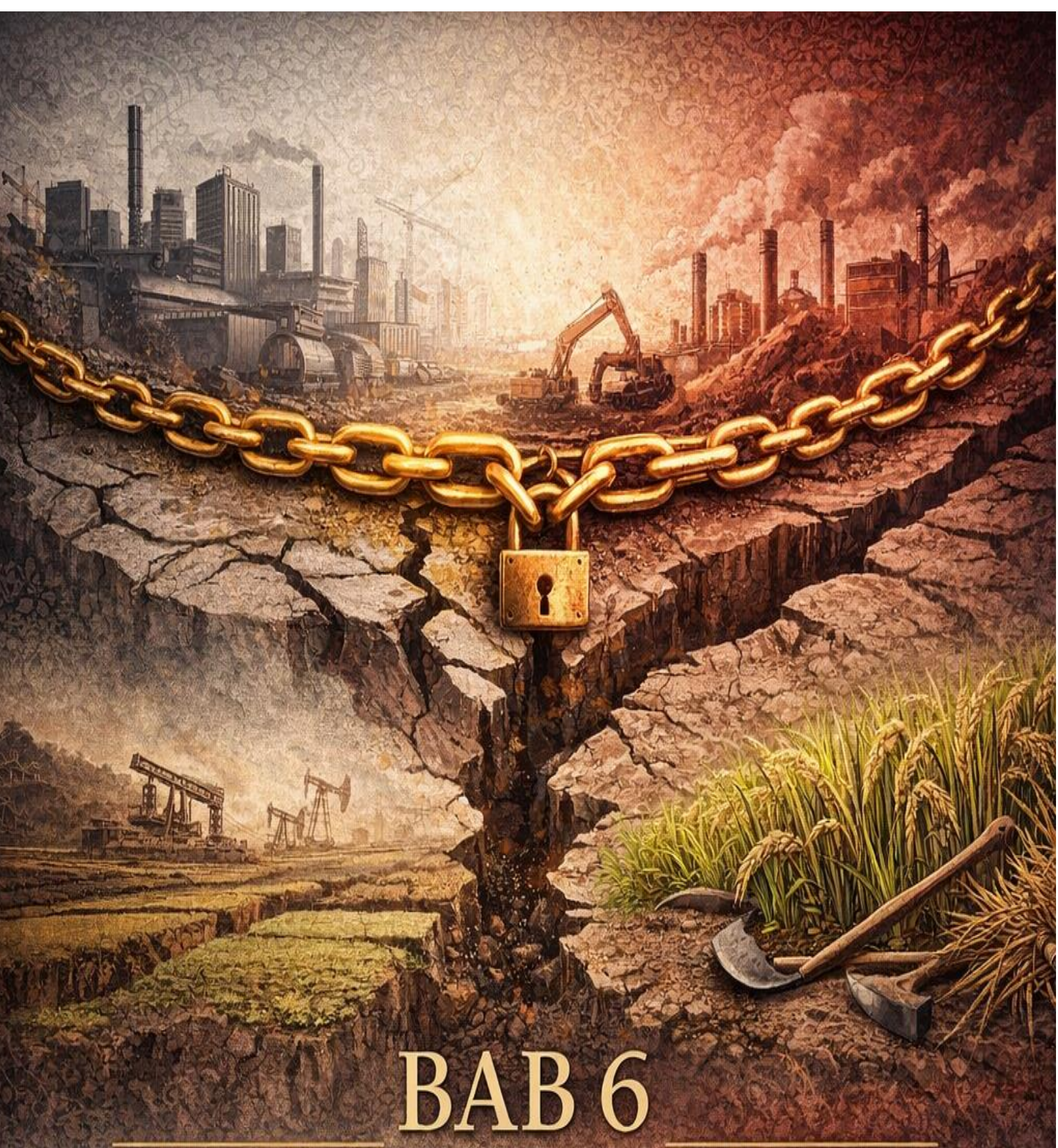
Transformasi Digital dan Demokrasi: *Antara Peluang dan Tantangan*

*"Pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempertajam demokrasi
sekaligus mengancamnya.*

---Miriam Budiardjo

Bab ini akan menganalisis dinamika *transformasi digital* dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia, *terutama peluang* yang ditekan manjau dan tantangan yang dihadapi

• Demokrasi Digital • Algoritma Kuasa • Disinformasi • Ruang Publik • Literasi Digital



BAB 6

Konflik Agraria dan Ketimpangan Sosial

Struktur Kekuasaan di Balik Sumber Daya Alam



BAB 7

Korupsi dan *Good Governance*: Pemberantasan yang Terhambat

“Korupsi adalah musuh utama bagi tata kelola yang baik.”

Korupsi merupakan hambatan terbesar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Upaya pemberantasan korupsi sering kali terhambat oleh kepentingan elit yang mengakar dan kurangnya komitmen politik untuk perubahan.

Korupsi Struktural | Good Governance | Elitisme | Patronase | Reformasi Birokrasi



BAB 8

Kesimpulan Sosiologi Politik *Kontemporer dan Masa Depan Indonesia*

“Menatap masa depan Indonesia...”

Dalam bab ini akan disampaikan sintesis dari berbagai pembahasan mengenai sosiologi politik kontemporer serta analisis mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di masa depan.

Sintesis Kritis

Masa Depan Demokrasi

Reformasi Struktural

Ketahanan Sosial



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2023).** *Masyarakat Post-Kolonial Indonesia: Dinamika Struktur dan Identitas*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Almond, G. A., & Verba, S. (2021).** *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (New Edition). Princeton: Princeton University Press.
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2024).** *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bappenas. (2023).** *Visi Indonesia 2045: Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bourdieu, P. (2022).** *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (New Edition). London: Routledge.
- boyd, d. (2023).** *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* (New Edition). New Haven: Yale University Press.
- Budiardjo, M. (2021).** *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Castells, M. (2021).** *Communication Power* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Castells, M. (2021).** *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Connell, R. W. (2021).** *Gender: In World Perspective* (4th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2022).** *The Mediated Construction of Reality: Society, Culture, Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Dahl, R. A. (2021).** *Democracy and Its Critics* (New Edition). New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2021).** *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Edition). New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (2022).** *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: St. Martin's Press.
- Donnelly, J. (2022).** *Universal Human Rights in Theory and Practice* (4th ed.). Ithaca: Cornell University Press.
- Easton, D. (2021).** *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, M. (2022).** *Power: The Essential Works of Michel Foucault 1954–1984* (New Edition). London: Penguin Classics.
- Freedom House. (2024).** *Freedom on the Net 2023: The Crisis of Social Media*. Washington, D.C.: Freedom House.
- Fukuyama, F. (2022).** *Liberalism and Its Discontents*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

- Geertz, C. (2021).** *The Interpretation of Cultures* (50th Anniversary Edition). New York: Basic Books.
- Giddens, A. (2021).** *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2021).** *Sociology* (9th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Habermas, J. (2022).** *Legitimation Crisis* (New Edition). Cambridge: Polity Press.
- Habermas, J. (2022).** *The Structural Transformation of the Public Sphere* (New Edition). Cambridge: Polity Press.
- Habermas, J. (2022).** *The Theory of Communicative Action* (New Edition). Boston: Beacon Press.
- Held, D. (2022).** *Models of Democracy* (4th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (2022).** *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Heywood, A. (2021).** *Global Politics* (3rd ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2021).** *Political Ideologies: An Introduction* (7th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2021).** *Politics* (6th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (2021).** *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2023).** *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2021).** *Power and Interdependence* (5th ed.). New York: Pearson.
- Koentjaraningrat. (2022).** *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Komnas HAM RI. (2023).** *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2024).** *Laporan Kondisi Agraria 2023*. Jakarta: KPA.
- Kymlicka, W. (2022).** *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (New Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Lipset, S. M. (2021).** *Political Man: The Social Bases of Politics* (Expanded Edition). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lukes, S. (2021).** *Power: A Radical View* (3rd ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Mannheim, K. (2021).** *Ideology and Utopia* (New Edition). London: Routledge.
- Marx, K., & Engels, F. (2022).** *The German Ideology* (New Edition). New York: International Publishers.
- Mead, G. H. (2021).** *Mind, Self, and Society: The Definitive Edition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Merton, R. K. (2021).** *Social Theory and Social Structure* (New Edition). New York: Free Press.
- Mietzner, M. (2022).** *The Politics of Oligarchy in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.

- Mills, C. W. (2021).** *The Sociological Imagination* (40th Anniversary Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Mudde, C. (2022).** *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Nugroho, Y., & Tjiptoherijanto, P. (2024).** *Governance in the Digital Age: Indonesia and Beyond*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Parsons, T. (2021).** *The Social System* (New Edition). London: Routledge.
- Perludem. (2023).** *Laporan Pemantauan Pemilu 2024*. Jakarta: Perludem.
- Piketty, T. (2022).** *Capital and Ideology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Putnam, R. D. (2022).** *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (20th Anniversary Edition). New York: Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (2022).** *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (New Edition). Princeton: Princeton University Press.
- Robison, R. (2022).** *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing.
- Sartori, G. (2021).** *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (New Edition). Colchester: ECPR Press.
- Schumpeter, J. A. (2021).** *Capitalism, Socialism and Democracy* (New Edition). London: Routledge.
- Schwartz, S. H. (2021).** An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–20.
- Soekanto, S. (2022).** *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tarrow, S. (2022).** *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Tönnies, F. (2021).** *Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft)* (C. P. Loomis, Trans.). London: Routledge.
- Transparency International. (2024).** *Corruption Perception Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- UNDP. (2023).** *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock—Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations. (2022).** *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.
- Van Dijk, J. (2022).** *The Digital Divide* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2023).** The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Wallerstein, I. (2023).** *World-Systems Analysis: An Introduction* (New Edition). Durham: Duke University Press.
- Weber, M. (2021).** *Economy and Society: A New Translation* (K. Tribe, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
- Winters, J. A. (2021).** *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wright, E. O. (2021).** *How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century*. London: Verso.
- Yin, R. K. (2021).** *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Sumber Media dan Sumber Daring

Kompas. (2024). *Peta Konflik Agraria di Indonesia*. [Kompas.com](https://www.kompas.com), 10 Februari 2024.

Tempo. (2024). *Kronologi Lengkap Kasus Korupsi E-KTP*. [Tempo.co](https://www.tempo.co), 15 Januari 2024.

GLOSARIUM

SOSIOLOGI POLITIK KONTEMPORER

DINAMIKA KEKUASAAN, STRUKTUR SOSIAL, DAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA

Akomodasi

Proses penyesuaian diri untuk meredakan ketegangan dan konflik, serta menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial. Bentuk-bentuk akomodasi meliputi koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, toleransi, dan konsiliasi. Dalam konteks politik Indonesia, akomodasi sering terjadi di tingkat elit melalui mekanisme koalisi pasca-pemilu, di mana partai-partai yang sebelumnya bersaing bergabung dalam pemerintahan. (*Bab 3*)

Akulturas

Proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing oleh suatu masyarakat tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Berbeda dengan asimilasi yang menghapus perbedaan, akulturas mempertahankan identitas dasar kelompok. Di era digital, akulturas berlangsung dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghasilkan fenomena *glocalization*—globalisasi yang diterjemahkan ke dalam konteks lokal. (*Bab 3, 5*)

Aktivisme digital

Gerakan sosial yang menggunakan platform digital—media sosial, petisi online, aplikasi pesan—sebagai sarana utama mobilisasi, komunikasi, dan advokasi. Aktivisme digital memungkinkan mobilisasi cepat dengan biaya rendah dan jangkauan luas, tetapi rentan terhadap *slacktivism* (partisipasi dangkal) dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Contoh di Indonesia: gerakan #ReformasiDikorupsi (2019). (*Bab 5*)

Algoritma

Kode komputer yang menentukan konten apa yang ditampilkan kepada pengguna platform digital. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan *engagement* (waktu yang dihabiskan pengguna), sehingga cenderung memperkuat konten yang emosional dan kontroversial. Dalam konteks politik, algoritma menciptakan *echo chambers* dan *filter bubbles* yang memperkuat polarisasi. (Bab 5)

Anomie

Kondisi kemerosotan norma dalam masyarakat ketika tujuan budaya tidak sejalan dengan sarana institusional yang tersedia. Konsep ini dikembangkan oleh Émile Durkheim dan diperluas oleh Robert K. Merton untuk menjelaskan penyimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia, anomie dapat terjadi ketika tujuan pembangunan nasional tidak diimbangi dengan sarana yang adil bagi semua warga. (Bab 1, 5)

Arbitrasi

Bentuk akomodasi di mana penyelesaian konflik dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan kedua belah pihak menerima keputusan tersebut. Dalam konteks konflik agraria, arbitrase sering dilakukan melalui pengadilan atau lembaga mediasi yang ditunjuk pemerintah. (Bab 3)

Artikulasi kepentingan

Fungsi partai politik atau kelompok kepentingan dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutan masyarakat ke dalam kebijakan publik. Di Indonesia, fungsi artikulasi kepentingan sering terdistorsi karena partai politik lebih berfungsi sebagai kendaraan oligarki daripada sebagai wadah aspirasi rakyat. (Bab 3, 8)

Asimilasi

Proses peleburan perbedaan antarindividu atau kelompok sehingga terbentuk kesatuan budaya yang baru. Asimilasi terjadi ketika kelompok dengan latar belakang budaya berbeda mengalami kontak intensif dalam jangka waktu panjang. Di Indonesia, kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru (asas tunggal Pancasila)

menekan ekspresi identitas etnis dan agama, yang kemudian meletus pasca-Reformasi. (*Bab 2, 3*)

Asosiatif

Proses sosial yang mengarah pada integrasi, kesatuan, dan kerjasama dalam masyarakat. Contoh proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dalam konteks Indonesia, gotong royong adalah bentuk asosiatif khas yang mencerminkan nilai-nilai kolektivisme dan solidaritas sosial. (*Bab 3*)

Bourdieu, Pierre (1930–2002)

Sosiolog Perancis yang mengembangkan konsep-konsep kunci seperti habitus, modal (ekonomi, budaya, sosial, simbolik), dan ranah (*field*). Karyanya sangat relevan untuk menganalisis reproduksi ketimpangan sosial dan kekuasaan di Indonesia, terutama dalam memahami bagaimana oligarki mengonversi modal ekonomi menjadi modal politik dan simbolik. (*Bab 1, 2*)

Budaya politik

Pola orientasi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap sistem politik, proses politik, dan peran mereka dalam politik. Almond dan Verba membedakan tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan. Budaya politik Indonesia pasca-Reformasi mengalami pergeseran dari budaya subjek (warisan Orde Baru) ke budaya partisipan, tetapi masih diwarnai oleh politik identitas dan polarisasi. (*Bab 1, 7*)

Budaya sipil (civic culture)

Kombinasi seimbang antara orientasi partisipan, subjek, dan parokial yang paling kondusif bagi stabilitas demokrasi. Konsep ini dikembangkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba berdasarkan studi lintas negara. Indonesia masih dalam proses menuju budaya sipil, dengan tantangan dari politik identitas dan polarisasi. (*Bab 7*)

Castells, Manuel (1942–)

Sosiolog Spanyol yang mengembangkan konsep *masyarakat jaringan* (*network society*) dalam trilogi *The Information Age*. Karyanya sangat relevan untuk menganalisis transformasi digital dan implikasinya bagi politik, termasuk bagaimana kekuasaan dalam masyarakat jaringan terletak pada kemampuan untuk memprogram dan mengalihkan jaringan komunikasi digital. (*Bab 1, 5*)

Civil society (masyarakat sipil)

Ruang di antara negara, pasar, dan keluarga, di mana warga secara sukarela berasosiasi untuk mengejar kepentingan bersama, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Di Indonesia, civil society mengalami ledakan pasca-Reformasi (1998–2004), kemudian menghadapi tantangan kooptasi, fragmentasi, dan tekanan dari kelompok konservatif serta negara. (*Bab 3, 8*)

Demokrasi elektoral

Model demokrasi yang menekankan pada kompetisi pemilu dan partisipasi prosedural sebagai mekanisme utama akuntabilitas. Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi elektoral karena pemilu yang kompetitif dan relatif bebas berlangsung secara konsisten, tetapi kualitas demokrasi substantif masih rendah. (*Bab 3*)

Demokrasi substantif

Model demokrasi yang menekankan pada kesetaraan politik, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas pemerintah, dan keadilan sosial—bukan hanya prosedur elektoral. Indonesia masih berjuang untuk mewujudkan demokrasi substantif karena dominasi oligarki, politik uang, dan ketimpangan sosial. (*Bab 3*)

Demokrasi digital

Fenomena di mana teknologi digital—terutama media sosial dan platform digital—mengubah cara politik dijalankan, termasuk kampanye, partisipasi, mobilisasi, dan pembentukan opini publik. Demokrasi digital membawa paradoks: di satu sisi

membuka partisipasi yang lebih luas, di sisi lain menciptakan disinformasi, polarisasi, dan pengawasan. *(Bab 5, 7)*

Desentralisasi

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Di Indonesia, desentralisasi diperluas pasca-Reformasi 1998 melalui otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), membawa demokrasi ke tingkat lokal tetapi juga melahirkan dinasti politik dan korupsi di daerah. *(Bab 2, 3, 8)*

Diferensiasi sosial

Pembedaan anggota masyarakat secara horizontal berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu yang tidak mengandung hierarki atau tingkatan, seperti etnis, agama, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan wilayah. Di Indonesia, diferensiasi sosial sangat kompleks dengan lebih dari 1.300 etnis dan 700 bahasa daerah. *(Bab 4)*

Digital divide (kesenjangan digital)

Kesenjangan akses, kemampuan, dan manfaat dari teknologi digital antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Mencakup kesenjangan geografis (perkotaan-pedesaan), ekonomi (kaya-miskin), dan literasi (melek digital-buta digital). Di Indonesia, kesenjangan digital menjadi faktor penting dalam akses terhadap informasi politik dan partisipasi politik. *(Bab 5)*

Digitalisasi

Transformasi fundamental dalam cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi akibat perkembangan teknologi komputer, internet, dan kecerdasan buatan. Digitalisasi mengubah ontologi sosial—cara kita menjadi, bertindak, dan berelasi—serta menciptakan paradoks bagi demokrasi. *(Bab 5)*

Disinformasi

Penyebaran informasi palsu yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan

publik, sering digunakan dalam konteks kampanye politik dan polarisasi digital. Berbeda dengan misinformasi (informasi palsu yang tidak sengaja) dan malinformasi (informasi benar yang disebarluaskan dengan maksud jahat). Di Indonesia, disinformasi marak menjelang pemilu. (*Bab 5*)

Disosiatif

Proses sosial yang mengarah pada persaingan, pertentangan, dan perpecahan dalam masyarakat. Contoh proses disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Dalam konteks Indonesia, politik identitas telah memperkuat proses disosiatif dengan memecah belah masyarakat berdasarkan afiliasi agama dan etnis. (*Bab 3, 4*)

Dualitas struktur (duality of structure)

Konsep kunci dalam teori strukturasi Anthony Giddens yang menyatakan bahwa struktur dan agensi saling membentuk: struktur memungkinkan sekaligus membatasi tindakan, dan tindakan agen secara berkelanjutan mereproduksi atau mengubah struktur. Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis perubahan sosial-politik di Indonesia, termasuk transisi demokrasi 1998. (*Bab 1, 2*)

Durkheim, Émile (1858–1917)

Sosiolog Perancis, salah satu pendiri sosiologi modern. Karya-karyanya meliputi *The Division of Labor in Society* (solidaritas mekanik dan organik), *The Rules of Sociological Method* (fakta sosial), dan *Suicide* (anomie). Pemikirannya tentang integrasi sosial dan solidaritas kolektif relevan untuk menganalisis kohesi sosial Indonesia di tengah polarisasi. (*Bab 1, 2, 3*)

Echo chamber (ruang gema)

Fenomena di mana individu hanya terpapar pada informasi dan opini yang sejalan dengan keyakinan mereka, terutama akibat algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna. *Echo chambers* memperkuat polarisasi dan mengurangi kemampuan berdialog lintas perbedaan. (*Bab 4, 5*)

Elitisme

Perspektif yang memandang bahwa kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil elit (ekonomi, politik, militer) yang memiliki kepentingan bersama dan mendominasi pengambilan keputusan. Di Indonesia, perspektif elitisme relevan untuk menganalisis dominasi oligarki dalam politik. *(Bab 6)*

Fakta sosial (social facts)

Cara bertindak, berpikir, dan merasa yang bersifat eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan memaksa. Konsep ini merupakan objek kajian utama sosiologi menurut Émile Durkheim. Dalam konteks Indonesia, fakta sosial meliputi struktur kelas, stratifikasi etnis, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi perilaku politik. *(Bab 1)*

Filter bubble

Kondisi di mana algoritma menyaring informasi yang tidak sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga pengguna tidak pernah menyadari bahwa ada perspektif yang berbeda. *Filter bubble* lebih dalam dari *echo chamber* karena pengguna hidup dalam realitas yang berbeda dengan fakta dan narasi yang berbeda. *(Bab 5)*

Fungsionalisme struktural

Perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, masing-masing menjalankan fungsi tertentu untuk mempertahankan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Tokoh utama: Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Perspektif ini dikritik karena cenderung mengabaikan konflik dan perubahan. *(Bab 4)*

Gemeinschaft dan Gesellschaft

Dikotomi yang dikembangkan oleh Ferdinand Tönnies untuk membedakan dua bentuk kehidupan bersama: *Gemeinschaft* (paguyuban) yang didasarkan pada ikatan batin dan tradisi, serta *Gesellschaft* (patembayan) yang didasarkan pada

kepentingan rasional dan kontrak sosial. Masyarakat Indonesia mengalami transisi dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*, tetapi nilai-nilai *Gemeinschaft* masih kuat, terutama di pedesaan. (Bab 2)

Giddens, Anthony (1938–)

Sosiolog Inggris yang mengembangkan teori strukturasi (*structuration theory*) yang mengatasi dualisme antara struktur dan agensi. Karyanya sangat berpengaruh dalam sosiologi kontemporer dan relevan untuk menganalisis perubahan sosial-politik, termasuk bagaimana struktur sosial membentuk tindakan politik dan sebaliknya. (Bab 1, 2)

Globalisasi

Proses intensifikasi hubungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya lintas batas negara, yang menyebabkan semakin terkoneksinya masyarakat di berbagai belahan dunia. Globalisasi membawa dampak positif (pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi) dan negatif (ketergantungan, ketimpangan, erosi budaya) bagi Indonesia. (Bab 5)

Glokalisasi (glocalization)

Proses di mana budaya global diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam konteks lokal, menciptakan bentuk-bentuk hibrida yang unik. Di Indonesia, glokalisasi terlihat dalam adaptasi K-pop oleh fandom lokal, atau penggunaan TikTok untuk kampanye politik. (Bab 5)

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan menegakkan supremasi hukum. Di Indonesia, good governance masih menjadi tantangan karena korupsi sistemik, birokrasi yang patrimonial, dan lemahnya partisipasi publik. (Bab 7)

Gotong royong

Bentuk kerjasama khas Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kolektivisme dan solidaritas sosial, bersifat instrumental (mencapai tujuan praktis) sekaligus ekspresif (memperkuat ikatan sosial). Gotong royong menjadi modal sosial penting bagi kohesi nasional di tengah tantangan modernisasi dan digitalisasi. *(Bab 3)*

Habermas, Jürgen (1929–)

Filsuf dan sosiolog Jerman yang mengembangkan teori tindakan komunikatif dan konsep ruang publik (*public sphere*). Karyanya relevan untuk menganalisis transformasi ruang publik di era digital, termasuk fragmentasi ruang publik akibat polarisasi dan disinformasi. *(Bab 4, 5)*

Habitus

Konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial dan agensi individu dihubungkan melalui disposisi yang terinternalisasi—terbentuk melalui sosialisasi tetapi menjadi basis bagi praktik yang mereproduksi atau mengubah struktur. Habitus kelas menengah Indonesia, misalnya, tercermin dalam preferensi pendidikan, gaya hidup, dan orientasi politik. *(Bab 2)*

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Mencakup hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan hak solidaritas. Di Indonesia, kemajuan HAM pasca-Reformasi masih dihadapkan pada tantangan impunitas, diskriminasi, dan tekanan terhadap kebebasan sipil. *(Bab 9)*

Hoaks

Informasi palsu yang disebarluaskan dengan sengaja untuk menyesatkan publik. Di Indonesia, hoaks marak menjelang pemilu, dengan topik utama isu SARA, isu kebijakan kontroversial, dan *black campaign* terhadap kandidat. Studi

menunjukkan hoaks menyebar 6 kali lebih cepat daripada informasi faktual. (*Bab 5*)

Ideologi

Seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang sistematis, yang menjadi dasar bagi tindakan politik dan sosial suatu kelompok atau masyarakat. Ideologi-ideologi besar dunia meliputi liberalisme, konservatisme, sosialisme, nasionalisme, dan multikulturalisme. Di Indonesia, Pancasila adalah ideologi bangsa. (*Bab 7*)

Imajinasi sosiologis (sociological imagination)

Kemampuan untuk menghubungkan biografi individu dengan sejarah sosial, serta membedakan antara *personal troubles* (masalah personal) dan *public issues* (masalah publik). Konsep ini dikembangkan oleh C. Wright Mills sebagai inti dari pendidikan sosiologi. (*Bab 5*)

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI)

Indeks yang diterbitkan oleh Transparency International yang mengukur persepsi tingkat korupsi di sektor publik suatu negara. Skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). CPI Indonesia stagnan di angka 34–38 dalam satu dekade terakhir, menunjukkan pemberantasan korupsi tidak mengalami kemajuan signifikan. (*Bab 7*)

Integrasi sosial

Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang fungsional dan harmonis. Integrasi sosial bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan agar tidak menjadi sumber disintegrasi. Di Indonesia, integrasi sosial menghadapi tantangan politik identitas, fragmentasi ruang digital, dan kesenjangan ekonomi. (*Bab 3, 4*)

Interaksi sosial

Hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, di mana masing-masing pihak saling memengaruhi, merespons, dan menciptakan makna bersama. Di era digital, interaksi sosial bertransformasi dengan karakteristik persistensi, skalabilitas, ketercarian, dan dekontekstualisasi. *(Bab 3)*

Interseksionalitas (intersectionality)

Konsep yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw untuk menjelaskan bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan (ras, gender, kelas) saling bersinggungan dan menciptakan pengalaman diskriminasi yang unik yang tidak dapat dijelaskan oleh satu dimensi saja. Dalam konteks Indonesia, interseksionalitas relevan untuk memahami pengalaman diskriminasi ganda yang dialami oleh perempuan dari etnis minoritas atau masyarakat adat. *(Bab 4)*

Kebijakan publik (public policy)

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Mencakup apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Di Indonesia, kebijakan publik sering dipengaruhi oleh kepentingan oligarki dan politik identitas, bukan oleh analisis kebijakan yang rasional. *(Bab 3, 6, 7)*

Kebudayaan

Keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Mencakup nilai, norma, dan artefak. Di era digital, kebudayaan mengalami transformasi dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi. *(Bab 2)*

Kekuasaan (power)

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan kehendaknya, meskipun ada perlawanan. Steven Lukes membedakan tiga dimensi kekuasaan: pengambilan keputusan, penetapan agenda, dan pembentukan keinginan. Di Indonesia, oligarki beroperasi pada ketiga dimensi kekuasaan ini. *(Bab 1, 6)*

Kelompok kepentingan (interest group)

Organisasi yang berusaha memengaruhi kebijakan publik tanpa secara langsung mencalonkan kandidat untuk jabatan publik. Di Indonesia, kelompok kepentingan yang paling berpengaruh adalah asosiasi pengusaha (Kadin, Apindo) dan kelompok kepentingan keagamaan (MUI, ormas Islam). *(Bab 8)*

Kelas menengah

Kelompok sosial yang berada di antara kelas atas dan kelas bawah, memiliki tingkat pendidikan menengah-tinggi, pendapatan yang cukup, dan gaya hidup perkotaan. Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat pasca-Reformasi (15% menjadi 25–30% populasi), tetapi terfragmentasi oleh politik identitas dan rentan terhadap guncangan ekonomi. *(Bab 2)*

Kelas sosial

Kelompok besar orang yang berbagi posisi ekonomi yang sama, yang memengaruhi peluang hidup (*life chances*) mereka secara signifikan. Di Indonesia, struktur kelas ditandai oleh ketimpangan yang tinggi, dengan 0,2% rumah tangga menguasai lebih dari 20% tanah. *(Bab 2, 4)*

Kerjasama (cooperation)

Usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama meliputi spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Gotong royong adalah bentuk kerjasama khas Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kolektivisme. *(Bab 3)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 30/2002 untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan luar biasa: penyadapan, penuntutan, koordinasi, dan supervisi. Masa keemasan KPK (2003–2010) ditandai oleh keberhasilan menangkap koruptor besar, tetapi kemudian dilemahkan melalui revisi UU KPK (2019). *(Bab 7)*

Konflik

Proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha saling meniadakan, mengalahkan, atau menghancurkan pihak lain, baik secara fisik maupun simbolik. Di Indonesia, konflik agraria adalah bentuk konflik yang paling persisten, mencerminkan ketegangan struktural antara negara, modal, dan masyarakat. *(Bab 3, 6)*

Konflik agraria

Sengketa antara masyarakat (petani, masyarakat adat) dengan korporasi atau negara mengenai penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah serta sumber daya alam. Konflik agraria di Indonesia meningkat dalam dua dekade terakhir seiring intensifikasi investasi ekstraktif dan infrastruktur. *(Bab 6)*

Konservatisme

Ideologi yang menekankan tradisi, keteraturan, dan stabilitas. Konservatisme lahir sebagai reaksi terhadap Revolusi Perancis dan gagasan liberal yang dianggap terlalu radikal. Di Indonesia, konservatisme agama menguat dalam satu dekade terakhir, memengaruhi politik identitas dan kebijakan publik. *(Bab 7)*

Kontrak sosial (social contract)

Teori yang menjelaskan asal-usul negara dan legitimasi kekuasaan melalui perjanjian antara individu untuk membentuk pemerintahan. Tokoh utama: Thomas

Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Teori ini menjadi fondasi bagi pemikiran politik modern tentang hak individu dan kewajiban negara. *(Bab 6)*

Kontravensi

Bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, ditandai oleh sikap tidak langsung, tersembunyi, dan perasaan tidak suka terhadap pihak lain. Di era media sosial, kontravensi menjadi semakin nyata melalui fenomena *cancel culture*, *hate speech*, dan *cyberbullying*. *(Bab 3)*

Korupsi

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi bersifat sistemik dan melibatkan berbagai level pemerintahan dan sektor. Kasus E-KTP (kerugian Rp 2,3 triliun) adalah contoh korupsi sistemik yang melibatkan koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan swasta. *(Bab 7)*

Kriminalisasi

Penggunaan hukum pidana untuk membungkam kritik, melawan aktivis, atau melindungi kepentingan politik dan ekonomi. Di Indonesia, kriminalisasi sering terjadi dalam konflik agraria (petani dan aktivis ditahan dengan tuduhan penghasutan) dan pemberantasan korupsi (pimpinan KPK dikriminalisasi). *(Bab 6, 7)*

Krisis legitimasi

Kondisi ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik menurun secara signifikan, mengancam stabilitas sistem politik. Di Indonesia, krisis legitimasi ditandai oleh rendahnya kepercayaan terhadap partai politik dan DPR, serta skeptisisme terhadap demokrasi. *(Bab 3, 6)*

Legitimasi

Keyakinan masyarakat bahwa kewenangan penguasa dan institusi negara adalah sah dan pantas untuk ditaati. Max Weber membedakan tiga tipe legitimasi:

tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Di Indonesia, legitimasi presiden Jokowi bersifat kharismatik-rasional, sementara legitimasi partai politik rendah. *(Bab 6)*

Liberalisme

Ideologi yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, dengan prinsip individualisme, kebebasan, rasionalitas, kesetaraan, toleransi, konsensus, dan pemerintahan terbatas. Liberalisme menjadi fondasi bagi demokrasi modern dan HAM. *(Bab 7)*

Literasi digital

Kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk mengevaluasi sumber informasi, mengenali hoaks, memahami cara kerja algoritma, dan melindungi data pribadi. Literasi digital kritis sangat penting untuk demokrasi digital yang sehat. *(Bab 5)*

Lukes, Steven (1941–)

Teoretikus politik Inggris yang mengembangkan teori kekuasaan tiga dimensi dalam *Power: A Radical View*. Karyanya sangat berpengaruh dalam analisis kekuasaan, termasuk bagaimana kekuasaan beroperasi pada tingkat pembentukan keinginan (dimensi ketiga), bukan hanya pada pengambilan keputusan dan penetapan agenda. *(Bab 1, 2, 6)*

Marx, Karl (1818–1883)

Filsuf, ekonom, dan revolusioner Jerman, pendiri teori Marxisme. Karyanya tentang konflik kelas, kapitalisme, dan ideologi sangat berpengaruh dalam sosiologi dan ilmu politik. Di Indonesia, pemikiran Marx relevan untuk menganalisis ketimpangan kelas dan eksploitasi. *(Bab 1, 2)*

Masyarakat (society)

Sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, saling berinteraksi, serta memiliki kesadaran kolektif dan ikatan identitas. Masyarakat Indonesia adalah salah satu masyarakat paling majemuk di dunia, dengan lebih dari 1.300 etnis dan 700 bahasa daerah. *(Bab 2)*

Masyarakat adat

Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, norma, dan hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Di Indonesia, hak masyarakat adat atas tanah (hutan adat) diakui melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, tetapi implementasinya masih lambat. *(Bab 6)*

Masyarakat jaringan (network society)

Konsep yang dikembangkan oleh Manuel Castells untuk menggambarkan transformasi struktur sosial yang didasarkan pada jaringan informasi digital, di mana kekuasaan terletak pada kemampuan memprogram dan mengalihkan jaringan. Indonesia adalah contoh masyarakat jaringan dengan penetrasi internet 78% dan pengguna aktif media sosial 180 juta. *(Bab 5)*

Mediasi

Bentuk akomodasi di mana pihak ketiga membantu proses negosiasi antara pihak yang berkonflik tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan. Dalam konflik agraria, mediasi sering dilakukan oleh Komnas HAM atau pemerintah daerah, tetapi hasilnya sering tidak mengikat. *(Bab 3)*

Micro-targeting

Strategi kampanye yang menargetkan segmen pemilih yang sangat spesifik dengan pesan yang disesuaikan dengan preferensi mereka, menggunakan data pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas digital. Micro-targeting menimbulkan risiko manipulasi pemilih dan erosi privasi. *(Bab 5)*

Mobilitas sosial

Pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial, baik secara vertikal (naik atau turun) maupun horizontal (berpindah tanpa perubahan status). Mencakup mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Di Indonesia, pendidikan menjadi saluran utama mobilitas sosial, tetapi akses yang tidak setara masih menjadi hambatan. *(Bab 4)*

Modal (capital)

Konsep Pierre Bourdieu tentang sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam ranah sosial. Bourdieu membedakan modal ekonomi (kekayaan), modal budaya (pengetahuan, kualifikasi, selera), modal sosial (jaringan hubungan), dan modal simbolik (prestise, legitimasi). Oligarki Indonesia menguasai semua bentuk modal ini. *(Bab 2)*

Modal sosial (social capital)

Jaringan hubungan, kepercayaan, dan norma kerjasama yang memungkinkan individu atau kelompok untuk bertindak bersama secara lebih efektif. Konsep ini dikembangkan oleh Robert Putnam. Di Indonesia, modal sosial mengalami penurunan akibat polarisasi politik identitas. *(Bab 4, 7)*

Multikulturalisme

Ideologi yang menekankan pengakuan terhadap keragaman budaya sebagai nilai positif dan landasan bagi kebijakan publik, menolak asimilasi yang dipaksakan. Indonesia secara formal menganut multikulturalisme melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, tetapi dalam praktiknya terjadi ketegangan antara pengakuan keragaman dan tekanan untuk homogenisasi. *(Bab 7)*

Nasionalisme

Ideologi yang menempatkan bangsa (*nation*) sebagai sumber utama identitas dan loyalitas politik, dengan prinsip kedaulatan nasional, identitas nasional, dan hak

menentukan nasib sendiri. Di Indonesia, nasionalisme menjadi perekat bangsa di tengah keragaman etnis dan agama. *(Bab 7)*

Negara

Organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan, mengatur kehidupan bersama, dan mengklaim monopoli penggunaan kekerasan yang sah (Weber). Unsur negara: wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. *(Bab 6)*

Nilai (values)

Gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik, benar, indah, dan penting dalam suatu masyarakat. Nilai menjadi fondasi bagi norma dan memberikan legitimasi moral bagi tindakan sosial. Di Indonesia, terjadi pergeseran nilai dari kolektivisme ke individualisme, serta ketegangan antara nilai tradisional dan modern. *(Bab 2)*

Norma (norms)

Aturan atau pedoman perilaku yang mengikat anggota masyarakat. Norma dapat dibedakan berdasarkan kekuatan sanksinya: folkways (cara), mores (kebiasaan), customs (tata kelakuan), dan laws (hukum). Di era digital, terjadi normative ambiguity karena norma di ruang digital sering berbeda dengan norma di dunia fisik. *(Bab 2)*

Oligarki

Sistem kekuasaan di mana sekelompok kecil elit menguasai sumber daya politik dan ekonomi, serta mendominasi pengambilan keputusan. Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai “kekuasaan yang dimiliki oleh kekayaan.” Di Indonesia, oligarki politik menjadi tantangan utama demokrasi pasca-Reformasi. *(Bab 3, 7)*

Omnibus Law UU Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang sekaligus. UU ini dikritik karena memudahkan perizinan investasi dengan mengorbankan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, serta diproses dengan cepat tanpa partisipasi publik yang memadai. *(Bab 6)*

Pancasila

Ideologi dan dasar negara Indonesia, yang dirumuskan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945. Terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *(Bab 7)*

Partai politik

Organisasi yang terorganisasi secara formal, yang bertujuan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan, biasanya melalui partisipasi dalam pemilihan umum, serta mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Di Indonesia, partai politik berfungsi sebagai kendaraan oligarki, bukan wadah aspirasi rakyat. *(Bab 3, 8)*

Patronase

Hubungan sosial yang didasarkan pada pertukaran tidak setara antara patron (yang memiliki sumber daya, kekuasaan, atau pengaruh) dan klien (yang memberikan loyalitas dan dukungan sebagai imbalan). Di Indonesia, patronase menjadi pola dominan dalam politik lokal dan nasional, serta menjadi akar korupsi. *(Bab 3, 7)*

Pemilihan umum (pemilu)

Mekanisme untuk memilih pejabat publik (eksekutif dan legislatif) melalui proses pemungutan suara yang melibatkan partisipasi warga negara. Fungsi pemilu meliputi legitimasi, representasi, akuntabilitas, rekrutmen politik, dan sosialisasi

politik. Di Indonesia, pemilu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka untuk DPR dan sistem distrik untuk pilkada. (*Bab 3, 8*)

Peran sosial (social role)

Seperangkat ekspektasi, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu status atau posisi sosial. Dalam masyarakat modern, individu sering menghadapi konflik peran (*role conflict*) ketika ekspektasi dari dua atau lebih peran tidak dapat dipenuhi secara simultan. (*Bab 2*)

Perubahan sosial

Perubahan dalam struktur sosial, pola interaksi, institusi, dan kebudayaan yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia, perubahan sosial yang paling signifikan adalah demokratisasi pasca-1998, globalisasi, dan digitalisasi. (*Bab 5*)

Persaingan (competition)

Proses di mana individu atau kelompok saling berlomba untuk mencapai tujuan tertentu yang terbatas, tanpa disertai ancaman kekerasan. Dalam politik Indonesia, persaingan elektoral yang terlalu intensif mendorong praktik politik uang dan polarisasi. (*Bab 3*)

Pluralisme

Perspektif yang memandang bahwa kekuasaan terdistribusi di antara berbagai kelompok kepentingan yang saling bersaing; tidak ada kelompok yang dominan secara permanen. Di Indonesia, pluralisme masih terbatas karena dominasi oligarki dan polarisasi identitas. (*Bab 6*)

Politik global

Interaksi antara berbagai aktor—negara, organisasi internasional, korporasi transnasional, masyarakat sipil global—dalam menangani isu-isu yang melampaui

batas-batas negara. Indonesia berperan dalam politik global melalui politik luar negeri bebas aktif dan peran dalam ASEAN. *(Bab 9)*

Politik identitas (identity politics)

Mobilisasi politik yang didasarkan pada identitas kelompok—seperti agama, etnis, ras, gender, atau orientasi seksual—yang dianggap terancam atau terpinggirkan. Di Indonesia, politik identitas mengalami kebangkitan pasca-Pilkada DKI 2017, menciptakan polarisasi yang mengancam kohesi sosial. *(Bab 4)*

Politik uang (money politics)

Praktik pembelian suara dalam pemilu, baik melalui uang tunai, barang, maupun bantuan sosial yang dikaitkan dengan kampanye. Di Indonesia, politik uang bersifat sistemik, melibatkan calon legislatif, tim sukses, pengurus partai, aparat desa, dan tokoh masyarakat. *(Bab 3)*

Populisme

Ideologi tipis yang membagi masyarakat menjadi “rakyat murni” versus “elit korup”. Populisme sering dikaitkan dengan politisi karismatik yang mengklaim mewakili kepentingan rakyat melawan elit. Di Indonesia, populisme Islam menguat pasca-Pilkada DKI 2017. *(Bab 4, 7)*

Presidensial

Sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Indonesia menganut sistem presidensial dengan pemilihan presiden langsung sejak 2004. *(Bab 6)*

Proporsional daftar terbuka

Sistem pemilihan umum di mana kursi dialokasikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh partai, dan calon dengan suara terbanyak dalam partai yang mendapatkan kursi akan duduk di parlemen. Indonesia menggunakan sistem ini

untuk pemilihan DPR dan DPRD. Sistem ini dikritik karena mendorong biaya kampanye yang tinggi dan politik uang. *(Bab 3)*

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga masyarakat adat memiliki hak atas hutan adat mereka. Putusan ini adalah terobosan penting dalam pengakuan hak masyarakat adat, tetapi implementasinya masih lambat. *(Bab 6)*

Reforma agraria

Kebijakan redistribusi tanah dan pengakuan hak masyarakat adat untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah. Di Indonesia, reforma agraria telah menjadi janji sejak awal Reformasi, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. *(Bab 6)*

Reformasi

Periode transisi politik di Indonesia pasca-kejatuhan Orde Baru pada 1998, ditandai oleh perubahan dari rezim otoriter ke demokrasi, desentralisasi, dan reformasi hukum HAM. Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, tetapi juga melahirkan oligarki baru. *(Bab 2, 3)*

Ruang publik (public sphere)

Arena di mana warga berkumpul untuk berdiskusi tentang isu-isu publik, membentuk opini, dan mengkritik kekuasaan, bebas dari dominasi negara dan kekuatan ekonomi (Habermas). Di era digital, ruang publik mengalami fragmentasi akibat polarisasi dan disinformasi. *(Bab 4, 5)*

Ruang publik digital

Transformasi ruang publik ke ranah digital dengan karakteristik persistensi, skalabilitas, ketercarian (*searchability*), dan dekontekstualisasi. Ruang publik

digital membawa peluang partisipasi yang lebih luas, tetapi juga ancaman disinformasi dan polarisasi. (*Bab 5*)

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka

Lihat **Proporsional daftar terbuka**.

Sistem politik

Keseluruhan interaksi, struktur, dan proses yang terkait dengan alokasi nilai-nilai otoritatif dalam suatu masyarakat. Mencakup institusi negara, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi elektoral presidensial multipartai dengan desentralisasi luas. (*Bab 7*)

Sistem presidensial

Lihat **Presidensial**.

Sistem sosial

Keseluruhan elemen-elemen sosial yang saling terkait dan berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mempertahankan keteraturan dan mencapai tujuan bersama. Mencakup subsistem ekonomi, politik, hukum, keluarga, pendidikan, agama, dan kesehatan. (*Bab 4*)

Sistem tiga dimensi kekuasaan

Teori kekuasaan yang dikembangkan oleh Steven Lukes yang membedakan tiga dimensi: dimensi pertama (pengambilan keputusan), dimensi kedua (penetapan agenda), dan dimensi ketiga (pembentukan keinginan). Dimensi ketiga adalah yang paling dalam dan sulit diubah karena beroperasi pada tingkat kesadaran dan habitus. (*Bab 1, 2, 6*)

Slacktivism

Partisipasi digital yang dangkal—hanya *like*, *share*, dan *comment*—tanpa

komitmen jangka panjang untuk perubahan. *Slacktivism* memberikan ilusi partisipasi tetapi dampaknya terbatas. (Bab 5)

Sosialisasi

Proses sepanjang hayat (*lifelong process*) di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, peran, dan kebudayaan masyarakat, sehingga ia dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Agen sosialisasi meliputi keluarga, pendidikan, teman sebaya, media, dan agama. (Bab 2)

Sosialisme

Ideologi yang menempatkan kesetaraan sosial dan kepemilikan kolektif sebagai nilai tertinggi, lahir sebagai kritik terhadap kapitalisme dan eksploitasi kelas buruh. Di Indonesia, sosialisme memengaruhi pemikiran para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta. (Bab 7)

Sosiologi

Ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Tokoh utama: Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, dan Anthony Giddens. (Bab 1)

Sosiologi politik

Cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara struktur sosial dan proses politik, termasuk pengaruh kelas sosial terhadap perilaku pemilih, peran etnisitas dalam konflik politik, serta dampak perubahan sosial terhadap stabilitas politik. (Bab 1)

Status sosial

Posisi atau tempat seseorang dalam struktur sosial. Status dapat bersifat *ascribed* (diperoleh tanpa usaha, misalnya jenis kelamin, ras, status kelahiran) atau *achieved* (diperoleh melalui usaha, misalnya pendidikan, pekerjaan). (Bab 4)

Stratifikasi sosial

Pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara hierarkis (vertikal), di mana setiap lapisan memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai dalam masyarakat. Di Indonesia, stratifikasi sosial dipengaruhi oleh warisan kolonial, struktur kelas, dan politik identitas. *(Bab 2, 4)*

Struktur sosial

Pola hubungan yang relatif stabil dan teratur antara berbagai elemen dalam masyarakat, yang membentuk kerangka organisasi sosial dan mengatur interaksi antarindividu serta kelompok. Struktur sosial Indonesia ditandai oleh ketimpangan yang tinggi dan fragmentasi identitas. *(Bab 2, 4)*

Strukturasi (structuration)

Teori yang dikembangkan oleh Anthony Giddens yang menekankan dualitas struktur dan agensi: struktur memungkinkan sekaligus membatasi tindakan, dan tindakan agen secara berkelanjutan mereproduksi atau mengubah struktur. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis perubahan sosial-politik. *(Bab 1, 2)*

Teori konflik

Perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai arena konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Tokoh utama: Karl Marx, Ralf Dahrendorf, dan C. Wright Mills. Di Indonesia, teori konflik relevan untuk menganalisis konflik agraria dan ketimpangan kelas. *(Bab 5, 6)*

Teori labeling (labeling theory)

Teori yang dikembangkan oleh Howard Becker yang menyatakan bahwa penyimpangan tidak melekat pada suatu tindakan, tetapi merupakan konsekuensi dari penerapan label oleh pihak yang berkuasa. Di Indonesia, kriminalisasi aktivis adalah contoh penerapan label untuk membungkam perlawanan. *(Bab 5, 6)*

Tindakan sosial (social action)

Tindakan yang memiliki makna subjektif bagi pelaku dan diarahkan pada orang lain. Konsep ini menjadi unit analisis utama sosiologi menurut Max Weber. (*Bab 1*)

Transformasi digital

Perubahan fundamental dalam cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi akibat perkembangan teknologi komputer, internet, dan kecerdasan buatan. Transformasi digital mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial secara fundamental. (*Bab 5*)

Weber, Max (1864–1920)

Sosiolog Jerman, salah satu pendiri sosiologi modern. Karya-karyanya meliputi *Economy and Society* (definisi negara, tipe legitimasi, birokrasi), *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, dan konsep kelas-status-partai. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam sosiologi dan ilmu politik. (*Bab 1, 2, 6*)

INDEKS

- #ReformasiDikorupsi, x, xv, xx, 83, 95, 96, 97, 98, 104, 147, 167
- Aktivisme digital, xix, xx, 72, 82, 96, 97, 98, 99, 104, 147, 167
- Algoritma, x, 71, 93, 94, 100, 104, 150, 167
- Anomie, 168
- Bourdieu, Pierre, 169, 205
- Budaya politik, 169
- Castells, Manuel, 169, 206
- Civil society, xix, 28, 53, 55, 57, 60, 129, 142, 146, 155, 156, 170, 207
- Demokrasi, iv, viii, ix, x, xii, xiv, xv, xviii, xix, xxii, xxiii, xxiv, 11, 17, 25, 27, 29, 38, 42, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 94, 102, 105, 145, 148, 156, 157, 159, 160, 161, 170, 198, 201, 207
- Digital divide, 171
- Digitalisasi, xxii, 10, 171
- Disinformasi, x, xiv, xv, 83, 91, 92, 94, 104, 148, 151, 171
- Echo chamber, 172
- Giddens, Anthony, 174
- Globalisasi, xxii, 10, 174
- Good governance, 174
- Habitus, vii, viii, 8, 9, 10, 12, 24, 30, 31, 33, 34, 175, 207
- Imajinasi sosiologis, 160, 176
- Interseksionalitas, 177
- Kekuasaan, iv, vii, viii, ix, xii, xv, xviii, 8, 17, 20, 22, 24, 36, 41, 42, 48, 101, 102, 103, 145, 160, 178, 195, 198, 199, 201
- Kelas menengah, 9, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 154, 178
- Kelompok kepentingan, 178
- Konflik agraria, xx, 11, 32, 106, 107, 125, 152, 179, 200, 207
- Korupsi, xi, xii, xiv, xv, xvi, xx, xxi, xxiv, 11, 17, 28, 58, 95, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 153, 166, 176, 179, 180, 198, 201, 207, 214, 215
- Legitimasi, 180
- Lukes, Steven, 181
- Marx, Karl, 181
- Masyarakat sipil, 36, 149
- Negara, viii, x, xi, xiv, xx, 5, 24, 65, 77, 78, 99, 103, 104, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 150, 152, 184
- Oligarki, viii, xii, xv, xvi, xviii, xxi, xxiii, xxiv, 9, 17, 25, 27, 29, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 57, 58, 59, 138, 139, 144, 145, 146, 149, 154, 157, 183, 184, 198, 201, 207
- Orde Baru, viii, ix, xiv, xvi, xviii, 1, 8, 20, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38, 46, 57, 64, 65, 66, 80, 119, 129, 141, 145, 146, 148, 149, 160, 168, 169, 188
- Pancasila, 26, 64, 69, 80, 168, 176, 185
- Partai politik, xviii, 25, 28, 44, 45, 55, 59, 79, 140, 142, 149, 158, 185
- Patronase, xii, xxi, 32, 138, 139, 140, 141, 144, 185
- Pemilihan umum, 38, 185
- Pilkada DKI, ix, xiv, xvii, xix, 2, 11, 14, 15, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 80, 91, 94, 150, 187, 200
- Politik identitas, 8, 11, 33, 62, 63, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 154, 156, 187, 200, 207
- Politik uang, 48, 50, 51, 58, 149, 187
- Reformasi 1998, iv, xv, xviii, 1, 7, 36, 127, 145, 146, 171
- Sosiologi politik, 3, 162, 190, 207
- Strukturasi, 191, 207
- Teori labeling, 191
- Transformasi digital, xix, 11, 82, 154, 158, 161, 192, 200, 207
- Weber, Max, 192

BIODATA PENULIS

Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M. , lahir di Yogyakarta , 13 Desember 1965 . Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di STIE Mulia Pratama pada tahun 2002 , Magister (S2) di Universitas Narotama pada tahun 2020, dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktor (S3) di Universitas Halu Oleo , dengan spesialisasi di bidang Ilmu Ekonomi. Penulis adalah Wakil Ketua III dan Dosen Tetap di STIE Mulia Pratama Bekasi(Masa Bhakti 2021-2025), mengampu mata kuliah Sosiologi Politik , Manajemen Strategik , Manajemen Kinerja , Perekonomian Indonesia dan Kebijakan Publik . Penulis juga aktif sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan (Masa Bhakti 2019–2025) serta Tim Pakar DPRD Kota Bekasi (**2018–2025**) .

Karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain:

- 1 *Strategi Perang melawan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, 2005
- 2 *Dilema Kekuasaan - Visi Perekonomian Indonesia 2025*, Pusat Karir dan Riset ,STIE Mulia Pratama, 2025
- 3 *Manajemen Kinerja*, Pusat Karir dan Riset ,STIE Mulia Pratama, 2026
- 4 *Analysis of the Influence of Product Quality and Distribution Strategy on Sales at PT Temprina Media Grafika Bekasi* , 2024
- 5 *Effect of Work Environment and Compensation on Employee Performance in PT Cedefindo Bekasi* , *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)* , Vol. 7, No. 2, 2024
- 6 *Akuntansi Keuangan Menengah II* (bersama Dr. Tony R Sinambela, S.E., M.M.), Pusat Karir & Riset STIE Mulia Pratama, 2022

Penulis dapat dihubungi melalui:

Email: yohanessekar@gmail.com

Telepon: 08176780872

Alamat Kantor: STIE Mulia Pratama, Jl. H.M. Joyomartono Kav. 5 Bekasi